

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pendidikan, perlindungan anak merupakan isu penting dan mendesak yang perlu mendapat perhatian. Anak-anak harus merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di lingkungan sekolah. Sejumlah pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, harus memberikan perhatian khusus dan menangani isu serius kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mereka yang seharusnya melindungi anak-anak sering kali menggunakan kekerasan terhadap mereka. *Save The Children* (2021) menyatakan bahwa kekerasan seksual anak terjadi di sebagian besar budaya tanpa mempertimbangkan ideologi dan kekayaan materi negara. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2002, sekitar 20% perempuan dan 5% laki-laki mengalami pelecehan seksual saat masih muda.

Situasi ini telah berkembang menjadi masalah besar yang membutuhkan kerja sama dan perhatian dari banyak pemangku kepentingan. Data UNICEF (2020), ditemukan bahwa 1 dari 10 anak mengalami bentuk kekerasan seksual di sekolah. Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Telah ada 1.478 laporan kekerasan terhadap anak (Pusat Data KPAI, Oktober 2023), dengan 615 kejadian melibatkan anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Data statistik terbaru tahun 2024, dari kementerian perlindungan perempuan dan anak Kemenpppa.go.id (2024) terdapat banyak kejahatan kekerasan terhadap anak di berbagai wilayah Indonesia. Situasi ini dapat merusak prestasi akademis dan motivasi belajar anak, selain juga dapat merusak kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak jangka panjang. Trauma psikologis yang dialami korban dapat bertahan hingga dewasa, menyebabkan berbagai gangguan mental seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan, dan depresi. Fadli, (2022) menegaskan bahwa penyintas kekerasan seksual anak berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental, penyalahgunaan zat, dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Selain itu, perempuan yang mengalami pelecehan seksual saat kanak-kanak memiliki risiko lebih tinggi dalam penyalahgunaan alkohol.

Sekolah sebagai lingkungan kedua yang aman bagi anak, memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan anak. Tanggung jawab sekolah tidak hanya terbatas pada penyediaan pendidikan formal, tetapi juga mencakup jaminan keamanan dan kesejahteraan siswa. Urgensi respon cepat dan tepat dari sekolah terhadap kasus kekerasan seksual menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan ini. Efektivitas respon sekolah sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan para pendidik, terutama guru, dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Faktor penting dalam mengelola masalah di sekolah adalah bagaimana guru melihat kasus kekerasan seksual terhadap siswa. Guru sebagai orang yang paling banyak berinteraksi dengan siswa di lingkungan sekolah. Guru juga bertanggung jawab menyediakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung

bagi murid-muridnya. Indikasi kekerasan seksual pada siswa sering kali teridentifikasi pertama kali oleh guru. Guru masih ragu melaporkan kasus tersebut, baik karena ketidakpahaman mengenai prosedur pelaporan baku maupun kekhawatiran akan konsekuensi yang potensial timbul.

Upaya dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa, guru harus siap menangani situasi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kesiapan ini mencakup lebih dari sekadar mengetahui apa itu kekerasan seksual; tetapi juga mencakup kemampuan mengidentifikasi tanda dan gejala yang mungkin ditunjukkan korban. Misalnya, seorang guru yang terlatih akan mampu mengidentifikasi perubahan perilaku yang mencolok pada seorang siswa, seperti penurunan prestasi akademik, perubahan dalam interaksi sosial, atau bahkan tanda-tanda fisik yang mencurigakan. Berdasarkan upaya tersebut, inisiatif pencegahan dan manajemen kasus memerlukan pemahaman komprehensif terhadap indikator-indikator ini.

Kesiapan guru memiliki peran penting, dari data penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam hal pelatihan yang memadai. Banyak guru merasa tidak siap dan ragu untuk bertindak ketika menghadapi situasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Faktor penghambat utama adalah kurangnya pengetahuan mengenai prosedur yang harus diikuti setelah mengidentifikasi potensi terjadinya kekerasan seksual. Misalnya, Saat seorang siswa melaporkan pengalaman buruknya terkait kekerasan seksual, guru sering kali tidak memahami cara merespons secara tepat, baik dalam memberikan bantuan kepada korban maupun dalam melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang yang relevan.

Kepala Biro Perempuan HKBP yang dipimpin oleh Ibu R.Sinaga dan UPTD PPA Tapanuli Utara melakukan pendampingan kepada siswa SD pada tahun 2024. Berdasarkan penuturan dua siswa SD korban kekerasan seksual, mereka telah melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Guru yang diberitahu tidak menindaklanjuti kasus ini kepada pihak berwenang. Salah satu korban menyatakan bahwa meskipun guru mengetahui kejadian tersebut, ia tidak mendapatkan perlindungan. Korban justru mengalami perundungan dari teman-temannya, yang mengakibatkan trauma dan keengganan untuk bersekolah. Keraguan para guru untuk bertindak tegas ini seringkali muncul karena ketakutan akan konsekuensi hukum atau tekanan dari orang tua siswa dan pihak sekolah jika mereka melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan kelembagaan yang kuat agar guru merasa aman dan didukung dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Peningkatan kesiapan guru dalam menangani kasus kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Dukungan dari pihak sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan kesiapan guru. Kesiapan guru dalam menangani kasus kekerasan seksual tidak bisa dianggap remeh. Guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai, mereka tidak hanya dapat melindungi siswa dari bahaya, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Siswa akan dapat belajar lebih efektif, memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, dan mampu mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dalam lingkungan sekolah yang aman dan suportif.

Ketidaksiapan guru dan minimnya dukungan dapat meningkatkan risiko bagi siswa dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Semua pihak harus berkomitmen dalam tugas bersama untuk memastikan kesiapan guru dalam menangani situasi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Di luar tanggung jawab profesional, terdapat kewajiban moral untuk melindungi generasi penerus dari ancaman terhadap kesejahteraan mereka."

Pradikto et al., (2022) mengungkapkan bahwa meskipun pendidik PAUD memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan seks anak usia dini, masih terdapat kebingungan dalam implementasinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan praktis di lapangan. Madrid et al., (2020) menyatakan bahwa pelatihan guru dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengidentifikasi kasus kekerasan seksual anak, dari 25% menjadi 57%. Intervensi "*Safe Schools for Teens*" juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pelaporan kasus kekerasan seksual anak, serta mengurangi kekerasan dalam pacaran. Uraian ini menegaskan pentingnya program pelatihan dan intervensi berbasis sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Sciacca et al., (2021) mengungkapkan adanya kecenderungan guru pra-jabatan untuk menyalahkan korban dalam kasus penyebaran gambar seksual yang diproduksi oleh remaja. Hasil ini menyoroti betapa pentingnya bagi calon guru untuk belajar berempati dan menghilangkan mitos-mitos tentang pemerkosaan agar menjadi lebih mahir dalam menangani situasi yang sensitif seperti kekerasan seksual.

Guru memiliki tugas dalam menangani kasus pelecehan seksual, sehingga harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual dan penanganannya. Pelaporan kasus kekerasan seksual menghadirkan kesulitan yang cukup besar bagi para pendidik. Guru takut mendapatkan dampak negatif pada pekerjaan mereka atau hubungan mereka dengan orang tua anak-anak mereka, banyak yang enggan melihat dan melaporkan situasi seperti itu. Stigma sosial yang melekat pada kasus kekerasan seksual, sering kali membuat korban dan saksi merasa terisolasi.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan dan nilai-nilai hukum, Indonesia telah membangun fondasi hukum yang kuat dalam upaya perlindungan anak, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Berbagai regulasi dan kebijakan telah tercermin, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya. Kebijakan perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada landasan hukum yang kuat, memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berpartisipasi secara optimal tanpa ancaman kejahatan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama, khususnya Pasal 9 Ayat (1a) menjamin hak anak untuk dilindungi dari kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lain oleh berbagai pihak di lingkungan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 memperkuat kerangka ini dengan memberikan panduan spesifik bagi kebijakan sekolah, termasuk kewajiban untuk membentuk tim khusus pencegahan dan penanganan kekerasan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah dalam konteks perlindungan anak merupakan turunan langsung dari komitmen negara untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Bayuca (2020, h. 59) menyatakan bahwa *"Thus, it implemented the Child Protection Policy to offer special protection to children who are threatened or endangered by conditions which affect their usual development and over which they have no control, and to assist the concerned agencies in their rehabilitation."*

Kebijakan perlindungan anak diterapkan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang terancam atau berada dalam bahaya yang dapat mengganggu perkembangan mereka secara normal. Anak-anak yang berada dalam kondisi ini sering kali tidak dapat mengendalikan situasi mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu anak-anak tersebut melalui intervensi dan rehabilitasi oleh lembaga yang berwenang. Kepala sekolah dan guru memainkan peran penting dalam mendeteksi dan merespons ancaman terhadap anak-anak, serta bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi anak-anak yang terpengaruh.

Implementasi kebijakan tidak hanya bisa dijalankan oleh pemerintah saja, tapi peran sekolah, orang tua serta masyarakat sangat berpengaruh dan kesadaran akan kebijakan tersebut dari masing-masing individu. Sekalipun regulasi ini sudah jelas, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Sehingga masih banyak kasus-kasus yang melanggar kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Kondisi ini tercermin dengan masih adanya beberapa sekolah yang belum memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang menyebabkan guru dan staf pendidikan sering kali kebingungan tentang langkah apa yang harus diambil ketika menghadapi situasi tersebut.

Kasus kekerasan seksual terhadap siswa harus ditangani dengan serius agar tidak berkembang lebih jauh, yang berisiko menyebabkan trauma yang

mendalam pada siswa. Trauma tersebut bisa menghalangi mereka untuk merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Seyogyanya, sekolah menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk belajar dan mengembangkan diri. Masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, karena merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Berdasarkan uraian ini, sangat penting untuk segera menangani dan menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah agar siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang mendukung.

Kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan implementasi di lapangan masih menjadi masalah besar yang perlu segera diperbaiki. Kasus nyata dari permasalahan ini adalah terungkapnya dugaan kasus kekerasan seksual di sebuah Sekolah Dasar Negeri di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang. Seorang siswi kelas III yang masih di bawah umur diduga menjadi korban tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kejadian ini terjadi pada 11 Mei 2022. Kejadian ini dilakukan di dalam ruang kelas dan disaksikan oleh sejumlah peserta didik lainnya, sehingga menambah keprihatinan atas peristiwa yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan pendidikan ini. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam mengakses pendidikan yang bermartabat.

Kasus tersebut salah satu kejadian nyata bagaimana kebijakan perlindungan anak di sekolah belum terimplementasi dengan baik. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman, sumber daya yang terbatas, dan hambatan struktural. Evaluasi berkelanjutan dalam kebijakan perlindungan anak menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitasnya dalam konteks yang terus berubah.

Kebijakan perlindungan anak di lingkungan sekolah, peran guru menjadi sangat penting dan strategis. Guru merupakan garis pertahanan pertama bagi siswa, sehingga sangat penting untuk memahami bagaimana mereka memandang situasi kekerasan seksual anak dan bagaimana pandangan tersebut memengaruhi cara mereka menanggapi masalah ini di sekolah. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, termasuk:

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan yang efektif
2. Minimnya pelatihan praktis bagi guru tentang penanganan kasus kekerasan seksual
3. Keterbatasan sumber daya dan dukungan sistem di sekolah

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menciptakan situasi yang kompleks dalam upaya perlindungan anak di sekolah. Sosialisasi kebijakan yang tidak efektif mengakibatkan banyak guru tidak memahami sepenuhnya prosedur dan protokol yang harus diikuti ketika menghadapi kasus kekerasan seksual. Minimnya pelatihan praktis yang seharusnya memberikan keterampilan dan kepercayaan diri bagi guru dalam menangani situasi-situasi sensitif tersebut.

Keterbatasan sumber daya dan dukungan sistem di sekolah semakin mempersulit implementasi kebijakan perlindungan anak secara efektif. Sekolah seringkali tidak memiliki tim khusus atau unit yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual, serta kurangnya akses ke layanan konseling atau pendampingan psikologis bagi korban. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara komprehensif.

Pendekatan sistematis dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, hingga masyarakat, untuk memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkala, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah-langkah penting yang perlu diimplementasikan. Diharapkan bahwa strategi yang lebih efektif akan dikembangkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi semua siswa, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan menganalisis penerapan kebijakan sekolah saat ini dan memahami bagaimana guru memandang dan menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keadaan ini dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam menghadapi kasus kekerasan seksual. Guru lebih bersedia melaporkan kasus dan bekerja sama dengan sekolah untuk menyelesaikannya jika mereka memiliki kesiapan mendalam tentang masalah tersebut. Jika guru merasa tidak memiliki dukungan dari sekolah atau merasa bahwa kebijakan perlindungan anak tidak efektif, guru mungkin akan enggan untuk mengambil tindakan.

Caffrey & Browne, (2023) menggunakan pendekatan *Realist Synthesis* untuk memahami bagaimana interaksi antara intervensi layanan anak dan konteks di mana intervensi tersebut diperkenalkan dapat mempengaruhi implementasi dan hasil. Mereka mengusulkan enam teori program yang menjelaskan bagaimana efek interaksi antara penalaran dan sumber daya dalam berbagai kondisi mempengaruhi implementasi kerangka kerja populer untuk pekerjaan sosial perlindungan anak, yaitu *Signs of Safety*. Temuan mereka mendemonstrasikan bahwa interaksi pada berbagai tingkat sistemik mempengaruhi implementasi dan memberikan panduan praktis untuk menginformasikan pengembangan dan penyampaian layanan.

Kecamatan Galang, merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki 43 sekolah dasar negeri dan 6 sekolah dasar swasta. Sekolah-sekolah ini berperan penting dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak di wilayah ini, meskipun masing-masing memiliki tantangan dan kelebihan tersendiri. Sekolah dasar ini memiliki tenaga pengajar yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dalam hal pendidikan, pengalaman, maupun keahlian. Keberagaman guru di sekolah-sekolah ini, memberikan kontribusi dalam proses pendidikan, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi para siswa.

Esensinya, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Kecamatan Galang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Peningkatan fasilitas pendidikan, penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah, sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Berdasarkan temuan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Galang, tercatat dua kali kejadian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh petugas kantin terhadap seorang siswa. Korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada guru kelas, sementara pihak kantin berargumen bahwa kontak fisik yang terjadi bersifat tidak disengaja karena aktivitas bolak-balik mengantarkan makanan kepada siswa. Pelatihan atau pembekalan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak belum diikuti oleh mayoritas guru. Kondisi tersebut membuat mereka kerap diliputi keraguan untuk bertindak terutama dalam proses pelaporan karena kesiapan yang belum memadai dan terbatasnya dukungan institusional dari pihak sekolah. Penanganan kasus seringkali bergantung pada inisiatif individu, bukan pada sistem kebijakan yang kokoh dan menyeluruh. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan sekolah yang telah ditetapkan dan implementasi yang terjadi di lapangan. Kurangnya sosialisasi, terbatasnya pelatihan praktis, serta lemahnya sistem pendukung menjadi hambatan serius dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Berdasarkan uraian ini, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kesiapan guru dan kebijakan sekolah dalam menghadapi dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Studi ini memberikan kontribusi substansial terhadap inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kerangka keselamatan anak di lingkungan pendidikan. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme sosial, penelitian ini memandang bahwa realitas sosial, termasuk persepsi dan kesiapan terhadap kasus kekerasan seksual, dibentuk melalui interaksi sosial dan interpretasi individu. Melalui pengalaman dan kontak antara peneliti dan subjek studi, serta

pertimbangan nilai-nilai dan latar belakang yang memengaruhi interpretasi fenomena yang diselidiki, pengetahuan dan pemahaman tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak di sekolah. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memahami kompleksitas pengalaman dan perspektif para partisipan dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai dinamika pandangan guru, implementasi peraturan perlindungan anak, dan respons sekolah terhadap insiden pelecehan seksual anak. Upaya dalam memecahkan masalah dalam latar berikut maka penelitian ini mengkaji secara spesifik kesiapan guru dan relevansi kebijakan sekolah di Kecamatan Galang, demi terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman dan responsif. Dengan judul "Analisis Kesiapan Guru dan Kebijakan Sekolah dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Siswa di Sekolah Kecamatan Galang".

1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitiannya untuk kekerasan seksual pada siswa di sekolah. Kekerasan seksual dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik jika terjadi, serta merumuskan strategi preventif yang lebih efektif di lingkungan sekolah.

2. Sub Fokus Penelitian

1. Kesiapan Guru dalam menghadapi kasus kekerasan seksual siswa di sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang.
2. Kebijakan Sekolah terkait penanganan kasus kekerasan seksual siswa di sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan guru di sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang dalam mengidentifikasi tanda dan merespons kasus kekerasan seksual siswa masih bervariasi atau belum optimal.
2. Pengetahuan guru mengenai prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual masih kurang jelas atau belum merata.
3. Dukungan kelembagaan dan sistematis dari pihak sekolah terkait penanganan kasus kekerasan seksual belum kuat atau belum memadai.
4. Kebijakan atau prosedur tertulis mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang belum tersosialisasi dengan efektif.
5. Pelatihan atau pembekalan khusus bagi guru mengenai penanganan kekerasan seksual masih terbatas atau belum intensif.

Dari masalah-masalah yang ditemukan di atas, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kesiapan guru dan kebijakan sekolah dalam menghadapi kasus kekerasan seksual siswa di kec Galang.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan guru di sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang dalam menghadapi kasus kekerasan seksual pada siswa?
2. Bagaimana kebijakan sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang terkait penanganan kasus kekerasan seksual pada siswa?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesiapan guru di sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dalam menghadapi kasus kekerasan seksual pada siswa.
2. Untuk menganalisis kebijakan sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terkait penanganan kasus kekerasan seksual pada siswa.

1.6. Paradigma Penelitian

Penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa asumsi dan pertimbangan. Pertama, peran guru sangat penting sebagai garis depan dalam merespons kasus kekerasan seksual. Kesiapan guru tidak hanya mencakup pengetahuan teoritis, tetapi juga aspek-aspek internal seperti kesiapan mental, kepedulian, empati, serta komitmen untuk melakukan pendampingan awal terhadap siswa korban. Selain itu, kesiapan juga meliputi keterampilan praktis dalam identifikasi, komunikasi, pelaporan, dan pemberian dukungan awal. Kesiapan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks dan dukungan sistem di sekolah.

Kedua, kebijakan sekolah merupakan instrumen penting yang membentuk lingkungan dan prosedur penanganan kekerasan seksual. Aspek kebijakan sekolah meliputi keberadaan dokumen formal seperti Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP), atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang jelas, serta implementasi dari kebijakan tersebut, seperti program pelatihan, sosialisasi, dan pembentukan tim penanganan khusus. Kebijakan yang jelas, sistematis, saja tidak cukup; implementasi dan dukungan nyata dari pihak sekolah adalah kunci keberhasilannya.

Dengan demikian, diimplementasikannya kebijakan perlindungan anak yang efektif dan ditingkatkannya kesiapan guru di sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang seharusnya akan berdampak pada penciptaan lingkungan belajar yang lebih aman dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual siswa. Penelitian ini akan meninjau bagaimana kedua aspek tersebut saling berkaitan dan berfungsi dalam upaya melindungi siswa sd negeri dari kekerasan seksual di wilayah Kecamatan Galang

1.7. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran terhadap pemahaman mengenai kesiapan guru dan implementasi kebijakan sekolah dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada isu kekerasan seksual pada siswa di lingkungan pendidikan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan masukan bagi sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- b. Membantu meningkatkan pemahaman dan kesiapan para pendidik dan pihak sekolah dalam menghadapi kasus kekerasan seksual siswa.
- c. Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan oleh pihak terkait (misalnya dinas pendidikan) dalam merumuskan strategi dan program perlindungan anak yang lebih efektif di wilayah Galang.

- d. Mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga di lingkungan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan seksual.

